

Pro dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim di Solo

M. Zainal Anwar¹, Yuyun Sunesti², Islah Gusmian³

^{1,3} Institut Agama Islam Negeri Surakarta

² Program Studi Sosiologi, Universitas Sebelas Maret

Received: 27 Februari 2020

Revised: 3 September 2020

Published: 27 April 2021

Abstrak:

Artikel ini mendiskusikan pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila pasca reformasi. Dengan memakai metode kualitatif, artikel ini menemukan bahwa ada keragaman pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila mulai dari yang bersikap tegas, mengambang, hingga yang cenderung bersikap menolak. Studi ini menemukan bahwa ada anak muda muslim yang menganggap bahwa Islam merupakan sumber dan inspirasi utama terhadap proses perumusan Pancasila dan menjiwai sila-sila dalam Pancasila. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang didalamnya terdapat berbagai ideologi mulai Islam, demokrasi hingga sosialisme. Selain dua pandangan tersebut, ada pula pandangan yang memahami bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mematuhi Pancasila. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa beragamnya pandangan anak muda muslim pasca reformasi terhadap Pancasila dan hubungannya dengan Islam dipengaruhi oleh keterlibatan dalam organisasi dan menurunnya perbincangan tentang ideologi dan dasar negara. Artikel ini memperkaya kajian tentang anak muda dan ideologi negara pasca reformasi.

Keywords:

Pancasila; Islam; ideologi negara; reformasi; anak muda muslim

Pendahuluan

Tulisan ini menyelidiki dinamika pemikiran anak muda muslim di Solo raya terhadap Pancasila sebagai dasar Negara dan hubungannya dengan Islam. Penyelidikan ini penting dilakukan karena Solo raya adalah salah satu basis gerakan radikalisme ekstrem di Indonesia (Ahyar, 2015; Haryanto, 2015a, 2015b; Wildan, 2008). Selain bukti-bukti yang disampaikan para sarjana, peristiwa "Bom Kartasura" yang terjadi sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2019 menjadi bukti aktual mengapa Solo raya masih ditandai sebagai basis gerakan radikalisme ekstrem. Peristiwa ini terjadi di pertigaan tugu Kartasura di depan pos

Korespondensi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jl. Pandawa, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168.
Email: zainalanwar@gmail.com

polisi yang menjadi penghubung utama wilayah Solo raya, Semarang dan Yogyakarta. Tindakan kekerasan ini dijalankan anak muda yang diduga terpapar bujuk rayu organisasi ISIS. sebagai tambahan informasi, anak muda ini adalah lulusan salah satu madrasah negeri di Kota Surakarta dan sempat teregistrasi di sistem informasi akademik perguruan tinggi Islam negeri di Surakarta dan tetapi tidak bersedia masuk kuliah karena ada mata kuliah Pancasila (Cnbcindonesia.com, 2019; Tribunnews.com, 2019).

Kasus ini tentu penting dicermati. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang nota bene adalah manusia. Ideologi buatan manusia ini biasanya menjadi basis penolakan aktivis gerakan radikalisme ekstrem. Hal ini juga memicu perbandingan dengan Al-Quran yang dipahami sebagai ideologi utama dan dasar tindakan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh Allah, Tuhan semesta alam. Dari sini, gerakan radikalisme ekstrem biasanya menawarkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. Dalam bahasa yang lain, sering pula dikampanyekan NKRI Bersyariah. Penolakan ini biasanya muncul dari kelompok yang diidentifikasi menolak Pancasila misalnya HTI yang memposisikan Pancasila sekedar filsafat buatan manusia dan tidak mau menempatkannya sebagai ideologi kebangsaan atau sebagai dasar Negara (Arif, 2016).

Selain peristiwa Bom Kartasura di atas, ada beberapa peristiwa gerakan radikalisme ekstrem yang melibatkan anak muda di wilayah Solo raya. Menariknya, kasus-kasus tersebut memiliki benang merah dimana melibatkan anak muda yang masih aktif di perguruan tinggi misalnya kasus Bahrin Naim yang diduga mahasiswa perguruan tinggi umum negeri hingga kasus Bom Panci yang ada sangkut pautnya dengan civitas akademika perguruan tinggi Islam negeri di Solo raya.

Munculnya berbagai kasus yang melibatkan anak muda dalam gerakan radikal ekstrem terutama penolakan Pancasila ini tentu memunculkan kegelisahan terkait dengan apa dan bagaimana pandangan anak muda muslim terhadap Islam dan Pancasila. Kasus-kasus di atas seolah mendukung beberapa survei publik yang menunjukkan adanya kemerosotan dukungan publik terhadap Pancasila. Hal ini misalnya bisa kita lihat dari beberapa hasil riset opini publik. Survei Wahid Foundation, Lembaga Survei Indonesia dan UN Women Foundation (2018) mendapati 82,3% informan yang mendukung Pancasila dan UUD 1945. Hal senada menjadi temuan CSIS (2017) dimana ada sekitar 90,5% informan menyokong Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara.

Hasil survei di atas tentu saja memberi kabar kurang membahagiakan dimana warga negara Indonesia di masa pasca reformasi ternyata tidak semua memposisikan Pancasila sebagai dasar negara secara bulat. Hal ini tentu saja penting untuk dikupas

lebih dalam lagi. Salah satu kelas sosial masyarakat yang menarik untuk ditelisik adalah kelas anak muda baik yang ada di sekolah, madrasah, perguruan tinggi maupun yang aktif dalam organisasi kepemudaan. Fokus utamanya terkait dengan orientasi dan pendapat anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai ideologi politik Negara dan relasinya dengan Islam. Dalam bingkai tersebut, tulisan ini berikhtiar menelusuri pandangan anak muda muslim terutama dari sisi pemahaman dan posisi anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan apakah ada celah untuk mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain.

Ada dua hal yang penting dijelaskan yaitu soal pilihan terhadap anak muda muslim dan pilihan lokasi Solo Raya. Anak muda muslim yang dimaksud adalah generasi muda muslim yang aktif atau tercatat sebagai pengurus di organisasi kepemudaan baik yang di perguruan tinggi, sekolah/madrasah hingga organisasi massa di Solo Raya. Kajian terhadap anak muda adalah mewakili arena baru dinamika kekuasaan. Dalam konteks kajian tentang pandangan anak muda muslim terhadap Pancasila, maka kita akan memperoleh gambaran pandangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara serta relasinya dengan Islam (Bayat & L, 2010).

Pilihan terhadap kajian anak muda sangat strategis dan penting karena pandangan anak muda berpotensi menjadi wajah masa depan bangsa dan negara. Karena itu, orientasi dan pemikiran anak muda saat ini akan menjadi proyeksi dinamika kekuasaan politik di masa depan. Tentu saja, pemikiran dan orientasi ini bisa berubah tergantung tingkat pengetahuan, pergaulan dan lingkungan anak muda tersebut.

Sementara Solo raya adalah istilah yang lazim dikenal untuk menggambarkan geografis daerah-daerah di sekitar Kota Surakarta yang secara sosial, ekonomi, politik dan budaya saling beririsan. Biasanya, sebutan Solo Raya akan merujuk ke wilayah Boyolali, Karanganyar, Klaten, Solo, Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri. Dalam tulisan ini, penyebutan Solo Raya akan merujuk pada wilayah tersebut.

Profil anak muda muslim yang menjadi informan dalam artikel ini bervariasi. Adanya keragaman ini diharapkan bisa mendapatkan pandangan yang lebih beragam dan representatif walaupun tentu tidak bisa menggeneralisir semua pandangan anak muda muslim di wilayah Solo. Paling tidak, adanya keragaman varian anak muda muslim menjadikan narasi dalam artikel ini bisa lebih mendalam dan mewakili banyak pihak.

Secara kelembagaan, ada tiga kategori organisasi yang menjadi sasaran yakni perguruan tinggi, sekolah/madrasah dan organisasi kepemudaan. Dari sini lalu dipilah lagi menjadi perguruan tinggi dan sekolah/madrasah yang berjenis negeri dan swasta. Adapun organisasi kepemudaan ada yang mainstream misalnya NU dan yang bersifat lokal misalnya MTA (Majelis Tafsir Al Quran) dan organisasi santri di pondok

pesantren. Varian ini diperdalam lagi dengan mewawancarai informan dengan tipe organisasi ekstra dan instar untuk perguruan tinggi serta organisasi OSIS dan Rohis untuk kategori sekolah/madrasah. Dengan profil informan yang beragam, maka diharapkan menghasilkan narasi yang bisa memberi gambaran yang meyakinkan walaupun tentu ada keterbatasan.

Tabel 1 Varian Informan

Jenis Lembaga Pendidikan	Tipe	Varian
Perguruan Tinggi Negeri	Organisasi Intra Kampus	Lembaga Dakwah Kampus
		Takmir Masjid Kampus/Marbot
		UKM Keislaman
		BEM/DEMA
	Organisasi Ekstra Kampus	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
		Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Perguruan Tinggi Swasta	Organisasi Intra Kampus	Lembaga Dakwah Kampus
		Pengurus Takmir Masjid/Marbot
		UKM Keislaman
		BEM/DEMA
	Organisasi Ekstra Kampus	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
		Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
		Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
		Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Negeri-Swasta	Rohis - OSIS	SMA dan Madrasah Aliyah
Organisasi Kepemudaan Islam Berbasis Ormas dan institusi pendidikan	Ormas Islam	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
		Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
		Sayap Pemuda Majelis Tafsir Al Quran (MTA)
		Organisasi santri pondok

Selain itu, tulisan ini juga menyelidiki cara pandang dan loyalitas anak muda muslim di Solo raya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana anak

muda muslim tersebut memahami hubungan Islam dan Pancasila. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, penulis memanfaatkan pendekatan kualitatif agar mendapatkan gambaran dan Informasi lebih mendalam.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini fokus terhadap kedalaman arti dan proses yang membentuk pemahaman dan pandangan informan (Denzin & Lincoln, 1994). Proses yang dimaksud adalah latar belakang, tujuan hingga pemahaman dan opini anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan relasi antara Islam dan Pancasila. Sementara makna yang hendak didalami adalah bagaimana anak muda muslim menyampaikan alasan atau pendapat tentang Pancasila sebagai dasar negara menghubungkannya dengan Islam. Urgensi pendalaman makna ini agar kita memahami situasi dan kondisi pikiran anak muda muslim terhadap Pancasila.

Studi terhadap Pancasila setelah tumbangnya Rejim Orde Baru jamak dilakukan. Namun begitu, tulisan yang memeriksa tanggapan anak muda muslim di Solo Raya sebagai daerah yang dipetakan sebagai basis gerakan radikalisme ekstrem belum banyak. Kebanyakan publikasi yang ada terkait dengan hubungan antara Islam dan Pancasila Humaidi (2010), ikhtiar menelisik harmoni dan landasan teoretis antara Pancasila dan Islam politik pasca reformasi Al Farisi (2019) dan memposisikan Pancasila sebagai basis pengembangan pendidikan karakter (Umardani, 2016).

Kajian yang memperhubungkan Pancasila dengan agama dilakukan dengan baik oleh Acac (2015), Ia mengamati praksis Pancasila dengan menggunakan kerangka teori *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah). Hasilnya, Pancasila ala Indonesia adalah ideologi kontemporer yang bisa menjembatani kehidupan bersama antaragama tanpa harus menyebut diri sebagai Negara sekuler atau Negara Islam. Dengan kata lain, Indonesia menunjukkan diri sebagai alternatif negara bangsa modern bagi teokrasi dan demokrasi sekuler.

Kemampuan Pancasila menyediakan diri sebagai ideologi yang menjembatani semua kepentingan dijelaskan dengan baik oleh (Latif, 2018b). Menurutnya, Pancasila adalah prinsip yang mempertemukan tiga ideologi yakni ideologi berhaluan keagamaan, ideologi berhaluan nasionalis, dan ideologi berhaluan sosialis. Sintesis ketiga ideologi ini menghasilkan ideologi alternatif yang kemudian disebut Pancasila setelah melewati tiga fase yakni “fase pembibitan”, “fase perumusan”, dan “fase pengesahan”.

Berbeda dengan kajian yang ada yang meletakkan Pancasila sebagai ideologi yang bisa mempersatukan warga Indonesia (Mu'ti & Burhani, 2019). Keduanya menengarai bahwa kasus intoleransi dan diskriminasi yang terjadi pasca reformasi bisa jadi terjadi sebagai sesuatu yang secara tak sadar terinternalisasi ke dalam Ideologi Pancasila. Mereka berargumen bahwa melalui sila pertama, Pancasila menjadikan Indonesia sebagai Negara berhaluan monoteistik religius, yang memberikan instrumen bagi pemerintah dan kemudian diaopsi kelompok masyarakat

guna mendorong agama non-teistik untuk merekonstruksi keyakinan teologis mereka sehingga bisa masuk dalam kategori agama yang diakui atau resmi.

Artikel lain mengupas tentang Pancasila sebagai asas tunggal. Ditilik dari sisi sejarah, sejak dulu hingga sekarang selalu muncul pemikiran dan aksi mengubah dasar negara yakni Pancasila. Pada jaman Orde Baru, upaya mengganti atau mempertanyakan Pancasila menemui jalan buntu dan selalu direspons negara dengan stigma buruk. Pasca Orde Baru, situasinya tidak berubah dan semakin berkembang seiring klaim kebebasan berpendapat dan berserikat. Beberapa sarjana menulis tentang bagaimana peran Pancasila merespons gerakan radikalisme ekstrem (M.A, 2009). Tulisan lain menyelidiki hubungan Pancasila dengan agama dan kebudayaan (Saidi, 2009).

Gerakan radikal keagamaan di Solo juga patut menjadi perhatian. Studi yang dilakukan CSRC UIN Jakarta (2010) menunjukkan bahwa beberapa masjid di Solo menjadi salah satu tempat untuk menyemai dan menyebarkan gagasan radikal ekstrem. Gerakan radikal keagamaan dalam bentuk kelompok kepemudaan juga marak di Solo misalnya yang terlihat pada organisasi Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) yang mengalami pergeseran dari islamisme ke premanisme (Kafid, 2016). Gerakan radikal keagamaan dalam bentuk kontestasi simbol dan identitas keagamaan di Solo seperti gerakan anti syiah hingga gerakan Parade Tauhid juga patut diperhatikan karena menjadi pemicu tumbuhnya Islam intoleran dalam berbagai bentuk mulai dari yang bersifat ideologis, instrumentalis hingga simbolis (Azca, Ikhwan, & Arrobi, 2019).

Kajian di atas banyak yang mengurai tentang gerakan radikalisme ekstrem di berbagai lapisan masyarakat maupun organisasi keagamaan. Melanjutkan kajian akademik di atas, tulisan ini fokus pada respons anak muda muslim di wilayah basis gerakan radikalisme ekstrem semacam Solo Raya terhadap Pancasila dan relasinya dengan Islam. Urgensi penyelidikan ini untuk mendapatkan Informasi terbaru tentang dinamika pemikiran anak muda muslim terhadap ideologi negara di wilayah basis gerakan radikalisme ekstrem. Ide dan opini anak muda muslim ini penting diketahui agar kita mendapatkan deskripsi ideologi negara di kalangan anak muda muslim yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan.

Berbeda dengan kajian-kajian yang sudah ada tersebut, artikel ini fokus pada pemikiran anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai dasar Negara serta relasi Islam dengan Pancasila pasca reformasi. Aspek ini menarik karena berupaya menggali pandangan anak muda muslim terhadap ideologi Negara pasca reformasi di dalam karakter wilayah yang menjadi basis gerakan radikal ekstrem. Hal ini didukung oleh konteks penggunaan media sosial dan tidak ketatnya sosialisasi ideologi kepada anak muda pasca reformasi.

Merujuk pada regulasi No 40/2009 tentang Kepemudaan, seseorang disebut pemuda apabila mereka berusia antara rentang 16-30 tahun. Sementara merujuk

(Secretary-General's Report to the General Assembly A/36/215, 1981), anak muda adalah mereka yang rentang umurnya 15-24 tahun, kondisi usia yang lazim diposisikan usia produktif dan memiliki banyak energi untuk mengelola atau menjalankan suatu organisasi. Perhatian utama artikel ini hendak mencermati anak muda muslim yang menjadi pengurus atau aktif dalam organisasi yang biasa melingkupi anak muda muslim.

Dalam artikel ini, relasi negara, Pancasila dan Islam dalam dinamika pemikiran anak muda muslim akan dianalisis dari tiga paradigma hubungan agama-negara (M. & Ghozali, 2011). *Pertama*, paradigma antara agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan yang lain. *Kedua*, paradigma mutualistik atau saling memerlukan. Dalam bingkai paradigma ini, agama dan negara saling melengkapi dan memberi manfaat. *Ketiga*, paradigma sekularistik yaitu memisahkan antara agama dengan negara. Artinya, agama dan negara berjalan dalam pakem masing-masing dan tidak ada keperluan saling melengkapi.

Artikel ini juga berikhtiar membahas Pancasila sebagai ideologi politik bernegara dalam kerangka pikir anak muda muslim. Ideologi adalah keyakinan, pandangan dan doktrin yang menjadi pondasi berpikir dan bertindak seseorang dalam berinteraksi dengan negara maupun warga. Dalam tingkatan tertentu, ideologi adalah instrumen yang menggerakkan pemimpin politik atau organisasi kemasyarakatan dalam mengelola lembaga dan semua aktivitas atau gerakannya (Heywood, 2007).

Merujuk pada latar pemikiran yang demikian, maka Pancasila bisa ditempatkan sebagai cara pandang warga negara Indonesia terhadap Negaranya dan aktivisme pemimpin Negara dalam menjalankan organisasi pemerintah. Artikel ini akan menggunakan cara pandang Ideologi untuk menyelidiki pandangan pemimpin anak muda muslim.

Berpedoman pada pikiran Popper, Talmon dan Arendt (Heywood, 2007), ideologi merupakan instrumen penting bagi pemimpin dalam mengelola kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan guna menggaransi loyalitas warga. Artinya, narasi ideologi Pancasila menekankan pada aspek membangun ketaatan relasi sosial, politik, ekonomi dan budaya antar warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada nilai-nilai dan cita-cita yang tercermin dalam Ideologi Pancasila.

Kata kuncinya terletak pada tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara agar memiliki cara pandang dan batasan yang sama. Dalam bingkai ideologi yang demikian, maka jelas tidak dibenarkan adanya ideologi ganda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang masyarakatnya beragam dari sisi suku, agama hingga latar belakang geografis. Bahaya adanya ideologi ganda adalah mencairnya atau lunturnya tingkat kepatuhan terhadap ideologi Pancasila yang telah disepakati sebagai ideologi berbangsa dan bernegara. Dampak paling mengerikan dari

ideologi ganda ini tentu saja potensi melawan negara dengan tindak kekerasan maupun pada level tidak lagi menganggap atau mengakui Pancasila sebagai ideologi politik negara. Bukti dari hal ini bisa ditilik dari hasil survei di atas dimana ada ketidakbulatan pendapat tentang Pancasila sebagai dasar negara.

Merespons kondisi dan situasi yang demikian, penulis meminjam term "Pembumian Pancasila" yang dipopulerkan Yudi (Latif, 2018b). Di era dimana kebebasan berpendapat dan kemajuan teknologi yang memungkinkan orang mencari informasi dari berbagai sumber, maka internalisasi Pancasila tidak lagi bisa disajikan dengan cara indoktrinasi sebagaimana masa Orde Baru. Perlu ada penyegaran dalam mendiseminasi Pancasila terutama kepada anak muda. Disini, perlu ada tiga hal yakni keyakinan (mitos), penalaran (logos) dan kejuangan (etos). Pada aspek mitos, Pancasila jelas harus menjadi sumbu penting dalam sosialisasi ideologi negara. Pada sisi logos, Pancasila disampaikan secara rasional dan kontekstual dalam bingkai keilmuan yang bisa menjadi inspirasi dalam laku kehidupan dan penyusunan kebijakan publik hingga legislasi. Adapun pada dimensi etos, maka Pancasila menjadi inspirasi bagi pertumbuhan dan perkembangan sikap kepercayaan diri agar selaras dengan kenyataan keseharian warga ((Latif, 2018b).

Untuk mencermati implementasi upaya pembumian Pancasila tersebut, penulis memanfaatkan pendekatan politik kewargaan. Dalam pendekatan ini, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan instrumen yang mengeratkan antara warga dan negara. Sebagai gambaran, jika Pancasila ditempatkan sebagai pegangan, cita-cita dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka warga negara adalah aktor utama yang senantiasa memegang Pancasila tersebut.

Pentingnya pemanfaatan pendekatan politik kewargaan adalah untuk mengamati bagaimana warga negara memberi rekognisi dan secara sukarela mengikatkan dirinya ke dalam negara. Ikatan ini dengan menjadikan Pancasila sebagai studi kasus. Hiariej dan Tornquist (Hiariej & Stokke, 2018), menyebut hal ini sebagai politik pengakuan. Dalam artikel ini, penulis hendak mendalami respons anak muda muslim terhadap Pancasila dan bagaimana mereka mengakui Pancasila sebagai ideologi negara yang mengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan begitu, artikel ini menawarkan penggunaan dua perspektif dalam menyelidiki pandangan anak muda muslim di Solo Raya terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan Islam yaitu "Pembumian Pancasila" dan "Politik Kewargaan." Kedua perspektif ini dipakai secara fleksibel dan dinamis agar tidak terkesan kaku.

Islam, Pancasila, dan Anak Muda

Bagian ini menggambarkan keragaman pandangan anak muda muslim terhadap Pancasila sebagai dasar Negara. Pandangan umum menunjukkan adanya

penerimaan anak muda muslim terhadap Pancasila dengan beragam argumen dan pikiran. Keragaman argumen ini merentang mulai dari konsensus pendiri bangsa terhadap Pancasila hingga yang memosisikan Pancasila sebagai instrumen pengikat persatuan bangsa Indonesia. Artikel ini menyajikan temuan penting yang mendiagnosa adanya gejala penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Temuan ini muncul dari narasi informan yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak memiliki kewajiban untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara apalagi menaatinya sebagai pedoman atau ideologi negara yang mengikat semua warga Indonesia.

Untuk memudahkan memahami aneka pandangan anak muda muslim tersebut, penulis memetakan adanya empat varian pemikiran mulai dari yang menerima hingga memiliki kecenderungan menolak. *Pertama*, argumen persatuan, menjaga kesatuan dan menyatukan keragaman bangsa. Argumen ini menjadi alasan umum yang ditemui pada pemikiran anak muda muslim di Solo Raya. Argumen ini menonjolkan aspek persatuan dan respek terhadap keragaman. Informan yang berasal dari takmir masjid kampus mengatakan bahwa adanya Pancasila dibutuhkan untuk menjadi daya ikat dan daya perekat diantara elemen bangsa Indonesia.

Pandangan tidak jauh berbeda muncul dari informan dengan latar belakang organisasi mahasiswa yang berpendapat bahwa Pancasila adalah kebutuhan mendasar bangsa Indonesia untuk mengikat diantara warga dan kelompok masyarakat yang beragam. Gagasan Pancasila sebagai ikatan persatuan makin penting karena adanya gejala fanatisme buta terhadap kelompok atau golongan masih cukup tinggi.

Pertimbangan lain yang menjadikan pentingnya Pancasila sebagai ikatan persatuan bangsa adalah urgensi nilai-nilai di dalam Pancasila yang mampu menyatukan berbagai pandangan golongan dan keagamaan sehingga tepat menjadi cermin kepribadian bangsa karena mampu mewadahi semua kelas sosial masyarakat di Indonesia. Informan yang berasal dari ROHIS menambahkan bahwa Pancasila sejatinya menjadi alat pemersatu semua rakyat Indonesia. “Tanpa adanya Pancasila, maka semua akan terpecah belah. Pancasila sangat dibutuhkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.” (Wawancara dengan informan pada tanggal 14 November 2018)

Selain itu, adanya Pancasila dipandang sangat menguntungkan dan membentengi Indonesia dari potensi terjadinya peperangan atau perpecahan sebagaimana saat ini terjadi di beberapa negara di daerah Timur Tengah. Menurut salah satu informan, hal ini karena Indonesia memiliki Pancasila.

Kedua, argumen Pancasila sebagai cita-cita dan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini muncul karena adanya persepsi bahwa Pancasila adalah rumusan dan hasil olah pikir pendiri bangsa yang latar belakang geografis dan pemikirannya juga beragam.

Karena dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang beragam tersebut, maka Pancasila mampu memenuhi dan menjadi landasan warga bangsa dalam mencapai cita-cita dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. “Pancasila sudah cocok menjadi menjadi landasan dasar negara Indonesia karena Pancasila dasar – dasarnya sudah menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Wawancara dengan informan pada tanggal 16 November 2018)

Sementara aktivis dari unit kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi Islam melihat bahwa setiap sila yang ada di dalam Pancasila selayaknya menjadi penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Informan dari aktivis organisasi mahasiswa menambahkan bahwa hal ini tidak lepas dari kenyataan sejarah bahwa Pancasila adalah buah pikiran cemerlang para pendiri bangsa yang tentu memiliki visi yang futuristik dalam membangun politik kesejahteraan dan keadilan sosial.

Disamping itu, nilai-nilai dalam Pancasila juga mampu bertahan dalam beberapa jaman dan tipe pemerintahan sehingga sangat tepat juga menjadi landasan penguatan karakter warga bangsa Indonesia. Nilai-nilai pokoknya yakni religiusitas, humanisme, persatuan dan kesatuan, kerakyatan serta keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang terus berkembang dan bisa menjawab tantangan dan persoalan kemasyarakatan dari generasi ke generasi.

Ketiga, argumen garansi terhadap keberagaman dan kebhinekaan. Beberapa informan menjelaskan bahwa eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara memberikan jaminan keberlangsungan keberagaman dan kebhinekaan yang merupakan fakta sosial di Indonesia. Tidak hanya beragam dari aspek suku dan agama, tetapi juga budaya sebagai dampak dari bentangan geografis berupa negara kepulauan.

Argumen ketiga ini salah satunya diutarakan oleh informan dari aktivis organisasi mahasiswa Islam. Bagi dia, Pancasila mencerminkan potret Indonesia yang memiliki kekayaan dan keragaman sosial budaya yang luar biasa. Dalam situasi tersebut, Pancasila bisa melampaui keragaman yang ada dan berdiri kokoh memayungi semua lapisan sosial masyarakat.

Informan dari Lembaga Dakwah Mahasiswa di perguruan tinggi Islam menambahkan bahwa Pancasila merupakan salah satu ideologi politik di dunia yang memiliki ciri utama pro keberagaman. Karena itu, Pancasila mampu bertahan dan selalu siap menghadapi tantangan jaman yang terus berubah dan sangat cocok di Indonesia yang memiliki lanskap sosial dan politik yang beragam.

Keempat, argumen kontra Pancasila. Pendapat ini muncul dari pernyataan Informan yang meragukan posisi Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan adanya keharusan bagi warga negara untuk mematuhi. Informan ini juga dengan meyakinkan mengatakan bahwa sebagai pemeluk Islam, maka pedoman dan dasar kehidupan hanya Al Quran. Bukan memakai dan mempedomani Pancasila sebagai

falsafah dan ideologi yang merupakan buah pikiran dan rumusan yang dibuat manusia, karena segala hal yang dibuat manusia bisa jadi salah.

Pendapat yang kontra Pancasila sebagai ideologi bangsa ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Dengan penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa Allah telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pegangan hidup yang melingkupi semua kebutuhan kehidupan. Informan Ini melanjutkan bahwa sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka memastikan tegaknya hukum Allah adalah prioritas yang tidak ada bandingannya dan tidak sebanding dengan menjalankan ideologi buatan manusia.

“Bukan berarti kami setuju untuk mengganti Pancasila, namun berdasarkan hadits Rasulullah SAW kelak akan datang waktu dimana bumi ini akan dikendalikan dibawah ideologi atau manhaj Islam. Dan kami tidak menafikan kemungkinan ideologi Pancasila ini akan tergantikan oleh hukum Allah.” (wawancara dengan informan pada tanggal 18 November 2018)

Informan ini menegaskan bahwa bukannya dia setuju bahwa ideologi Pancasila perlu diganti, namun berpegang pada hadits Nabi yang mengatakan bahwa pada suatu hari nanti bumi atau dunia ini akan diatur oleh ideologi atau manhaj Islam. Dengan kata lain, informan ini adalah tipe individu yang masih belum sepenuhnya yakin dengan posisi Pancasila sebagai dasar Negara.

Relasi Islam dan Pancasila

Hubungan antara Islam dan Pancasila bisa jadi ditakdirkan selalu ramai didiskusikan sejak proses perumusan hingga saat ini. Beberapa Informan mengklaim bahwa Islam merupakan inspirasi dan rujukan gagasan dalam penyusunan sila-sila dalam Pancasila. Jika diklasifikasi, maka ada sebagian informan yang mengatakan bahwa Islam dan Pancasila memiliki hubungan erat, tetapi ada pula informan yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan jalan tengah diantara berbagai ideologi di dunia dimana Islam adalah salah ideologi di dunia yang turut mewarnai Pancasila.

Berpijak pada gambaran awal di atas, muncul empat argumen pokok yang terkait dengan relasi Islam dan Pancasila berdasarkan kasus anak muda muslim di Solo Raya. *Pertama*, argumen yang memahami bahwa terdapat keselarasan diantara Islam dan Pancasila. Argumen ini menegaskan bahwa Islam dan Pancasila tidak saling menegasikan tetapi justru menciptakan keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berpijak pada argumen ini, Islam dan Pancasila bukan sesuatu yang harus diperbandingkan karena antara satu dengan yang lain memiliki langgam yang berbeda. Meski demikian, yang patut digarisbawahi adalah adanya informan yang menyatakan bahwa andaikata ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, maka sebagai umat Islam tidak akan menerima Pancasila. Hal ini karena sebagai umat Islam tentu mengedepankan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan.

Tetapi, pada kenyataannya, merujuk keterangan informan yang lain, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sejalan dengan Islam dan tidak ada sila dalam Pancasila yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Jika ditelisik, semua sila dalam Pancasila mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam mulai dari aspek teologis, isu kemanusiaan hingga keadilan. Informan lain mengakui bahwa tidak ada pula kesenjangan antara Islam dengan Pancasila sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menolak Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Karena dasar – dasar Pancasila sendiri sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu mengajarkan dalam ketuhanan, keadilan dan persatuan yang mana Islam dan Pancasila dapat berjalan beriringan,” kata informan (Wawancara dengan informan pada tanggal 16 November 2018).

Soal berjalan beriringan, informan lain memberi ibarat bahwa keterhubungan Islam dan Pancasila selayaknya kaki manusia yang meskipun berbeda antara kaki kanan dan kiri tetapi selalu bisa berjalan beriringan, saling menopang dan menguatkan. Informan ini juga meyakini bahwa ajaran Islam sudah memberi warna yang kuat dalam narasi Pancasila.

Kuatnya warna ini diterangkan salah satu informan lainnya yang mengatakan bahwa praksis Pancasila tentang musyawarah, saling menghormati dan menghargai dan soal keadilan bisa jadi juga terinspirasi dari ajaran Nabi Muhammad. Karena itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai salah satu cara umat Islam meneladani sikap dan perbuatan Nabi Muhammad yang sejak awal diutus untuk mengatasi persoalan moral kemanusiaan.

Argumen pertama ini juga sejatinya menegaskan soal sisi keseimbangan. Informan yang berasal dari organisasi pemuda muslim menjelaskan bahwa tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila. Karena itu, tatkala kita hidup di Indonesia, maka mestinya kita mematuhi apa yang menjadi ketentuan dan kesepakatan bersama di Indonesia tanpa perlu mengabaikan ajaran Islam karena justru negara Indonesia memberi ruang dan kesempatan yang memadai bagi setiap umat beragama menjalankan ajaran agama yang diyakininya termasuk umat Islam. “Kita beragama Islam dan menjalankan ajaran Islam kita bernegara juga menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi antara Islam dan Pancasila itu seimbang/balance,” kata informan (wawancara dengan informan pada tanggal 2 November 2018)

Informan dari organisasi siswa madrasan aliyah negeri meyakini bahwa keseluruhan narasi sila dalam Pancasila mendekati ajaran-ajaran pokok dalam Al Quran. Informan ini memberi istilah "Islam Pancasila" yang merujuk pada kenyataan pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok dan golongan yang ada di seantero Nusantara.

Kedua, argumen sejarah yang menunjukkan bahwa kebanyakan pihak yang terlibat dalam proses perumusan narasi Pancasila adalah tokoh umat Islam yang dinilai telah mampu menginternalisasikan dan mengkontekstualisasikan nilai dan

ajaran Islam ke dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Sisi sejarah sosial pemikiran Pancasila ini menjadi perhatian salah satu informan yang berlatarbelakang relawan Masjid kampus.

“Antara Islam dan pancasila bukanlah dua ideologi yang saling berbenturan. Islam itu diletakkan sebagai pondasi dalam ideologi Pancasila, jadi Islam itu bukan Pancasila akan tetapi nilai-nilai Islam itu telah masuk ke dalam Pancasila yang mana Pancasila itu sendiri digunakan sebagai ideologi bangsa Indonesia.” (wawancara dengan informan pada tanggal 6 November 2018)

Latar belakang para perumus Pancasila memang tampak menjadi salah satu perhatian penting beberapa informan salah satunya yang berasal dari SMA swasta. Menambahkan penjelasan informan di atas, informan dari SMA swasta ini menilai bahwa para tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan Pancasila adalah karakter tokoh Islam yang berpikiran luas, sadar akan keragaman nusantara dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, maka pemikiran tokoh Islam ketika merumuskan Pancasila justru berhasil menjaga pluralitas bangsa Indonesia yang telah mengakar di nusantara.

Ketiga, argumen yang kontra terhadap narasi keselarasan antara Islam dan Pancasila tetapi masih mengakui bahwa Islam berkontribusi dalam narasi Pancasila. Argumen ini menegaskan bahwa ditilik dari asal usul dan sumbernya, maka antara Islam dan Pancasila jelas berbeda dan tidak bisa disandingkan. Meski demikian, argumen ini menilai bahwa umat Islam di Indonesia masih cukup beruntung karena pada kenyataannya, Islam menjadi rujukan dalam proses perumusan Pancasila sehingga Indonesia tidak jatuh ke negara liberal.

Argumen ini muncul dari pendapat salah satu informan yang berasal dari organisasi mahasiswa muslim. Informan ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak bisa dikomparasikan dengan yang lain. Selain itu, Al-Quran adalah pedoman hidup yang mengatur dan mencakup semua tata laku kehidupan manusia. Hal ini tentu saja tidak sama dengan Pancasila dimana gagasan dan rumusannya dilakukan oleh manusia yang memiliki sifat tidak sempurna. Dengan begitu, hal ini tidak bisa disamakan atau disejajarkan apalagi dibandingkan dengan Islam dan Al-Quran. “Sebagai sebuah rumusan, maka Pancasila tidak bertentangan dengan isi Al-Quran,” kata informan.

Meskipun argumen ketiga ini masuk kategori kontra terhadap hubungan Islam dan Pancasila yang menegaskan bahwa antara keduanya tidak bisa dikomparasikan atau disejajarkan, tetapi masih terbersit pengakuan bahwa untungnya nilai dan ajaran Islam bisa masuk ke dalam Pancasila. Hal ini berbeda dengan argumen yang keempat dimana level kontranya cukup ekstrem.

Keempat, argumen yang kontra terhadap hubungan Islam dan Pancasila serta menganggap bahwa Pancasila adalah ideologi warna warni yang mencampur aduk berbagai ideologi politik yang ada di dunia. Dengan begitu, tidak bisa dikatakan bahwa

ajaran Islam memberi warna dalam perumusan Pancasila karena pada kenyataannya para perumus Pancasila saat itu menerima dan menginternalisasikan beragam Ideologi dan pandangan politik yang ada dan berkembang di dunia saat itu.

Penjelasan argumen yang keempat ini berasal dari salah satu informan yang masih duduk di madrasah aliyah negeri. Informan ini menilai bahwa para perumus Pancasila telah menjadikan berbagai ideologi politik di dunia sebagai rujukan dan pedoman dalam membuat narasi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila adalah hasil kompromi beragam ideologi dimana Islam tidak bisa dikatakan memberi warna yang penuh dalam Pancasila. Justru Islam menjadi turun derajatnya karena disandingkan dengan ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme dan demokrasi.

Merujuk pada bingkai pemikiran yang demikian, lanjut informan tersebut, tidak tepat adanya pemahaman bahwa nilai dan ajaran Islam telah diinternalisasi ke dalam sila yang ada pada Pancasila. Dengan begitu, tidak perlu ada anjuran untuk mematuhi atau mengikuti Pancasila. Berbeda dengan kewajiban mentaati ajaran Islam bagi para pemeluk Islam. Karena Pancasila juga berisi ideologi yang lain, maka umat Islam tidak memiliki kewajiban untuk patuh terhadap Pancasila.

Respons Terhadap Upaya Mengganti Ideologi Pancasila

Diantara tantangan politik pasca tumbanginya rejim Orde Baru yang menyita perhatian publik adalah adanya gerakan untuk mengganti ideologi Pancasila. Jika ditelisik, adanya gerakan ini bisa dilihat sejak munculnya peraturan daerah (perda) bernuansa agama yang lazim disebut perda syariah di beberapa daerah, sosialisasi dan meluasnya kampanye khilafah hingga wacana NKRI Bersyariah. Muara gerakan ini sejatinya "menggoyang" ideologi Pancasila secara langsung maupun tidak.

Merespons situasi dan kondisi tersebut, pendapat para informan bisa dibingkai dalam tiga kerangka. *Pertama*, pemikiran dan pendalaman terhadap Pancasila bisa diterima dalam bingkai nalar dan perspektif akademik. Artinya, boleh saja membahas dan memikir ulang penerapan sila-sila dalam Pancasila. Sebagai sebuah ideologi politik, maka Pancasila tentu bisa dipelajari dan dikaji oleh para akademisi maupun kaum cendekiawan.

Dalam kerangka pertama ini, para informan menilai bahwa adanya dinamika pemikiran dan penyegaran terhadap narasi Pancasila masih bisa diterima sepanjang dalam koridor akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pembelajaran dan pendalaman terhadap Pancasila, maka Ideologi ini akan terus hidup dan dipahami secara ilmiah, bukan dengan cara indoktrinasi sebagaimana ditempuh rejim Orde Baru.

Kedua, jika pendalaman terhadap Pancasila dalam bingkai untuk mengganti Pancasila, maka hal ini tidak bisa diterima apalagi jika levelnya adalah menentang keberadaan dan kesepakatan Pancasila sebagai ideologi politik berbangsa dan

bernegara. Ada salah satu informan yang secara tegas mengatakan bahwa organisasi atau kelompok seperti HTI yang menentang terhadap Pancasila sudah semestinya dilarang di Indonesia.

Informan lain menambahkan bahwa belajar dan mengkaji berbagai ideologi politik yang ada atau pernah ada di dunia ini tidak dilarang. Sejak dulu para akademisi di perguruan tinggi belajar tentang ideologi-ideologi politik seperti komunisme, sosialisme dan sebagainya tetapi dalam bingkai akademik dan nalar ilmu pengetahuan. Para akademisi tersebut belajar dan mendalami ideologi-ideologi tersebut bukan berniat untuk mengkampanyekan atau bahkan mengganti Pancasila. Tetapi jika ada gerakan atau kelompok yang mempelajari ideologi tertentu dan hendak menerapkan dan menggantikan posisi Pancasila, maka tentu gerakan atau kelompok tersebut harus dilarang di Indonesia.

Ketiga, adanya keyakinan bahwa runtuhnya ideologi Pancasila akan berlangsung secara alamiah dan bagian dari takdir Tuhan. Respons ini muncul dari informan yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri yang menyatakan bahwa persoalannya bukan pro atau kontra terhadap Pancasila. Tetapi, merujuk pada keterangan Nabi Muhammad, maka pada suatu hari, bumi ini akan dikendalikan oleh ideologi atau *manhaj* Islam. Karena itu pula, informan ini sangat yakin bahwa suatu saat ideologi Pancasila akan runtuh dan digantikan oleh hukum Allah.

Politik Persepsi : Pembahasan

Salah satu perbedaan menonjol aspek sosialisasi Pancasila pada masa orde baru dengan pasca orde baru adalah dari sisi internalisasi Pancasila. Pada masa kekuasaan Presiden Soeharto selama puluhan tahun, Pancasila dipakai sebagai media indoktrinasi dan instrumen kontrol di semua tingkatan mulai siswa sekolah, dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi hingga proses perekrutan pegawai pemerintah. Semua diwajibkan mengikuti kegiatan sosialisasi Pancasila yang biasanya disebut dengan penataran (Geertz, 1981; Hasan, 2012; Ricklefs, 2008).

Situasinya berbeda dengan mayoritas publik di masa pasca orde baru. Tumbangnya Presiden Soeharto diikuti pula dengan peninjauan kembali semua kebijakannya tentang sosialisasi Pancasila. Bahkan ada kesan bahwa Soeharto sama dengan Pancasila sehingga ikut pula "ditumbangkan." Dalam konteks ini, publik seolah sedang mempertanyakan dan mengkaji ulang posisi Pancasila. Di saat itu pula, gerakan atau kelompok yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain mulai bergerak. Pada akhirnya, di masa awal reformasi, Pancasila menjadi sasaran kritik dan bahan perdebatan.

Dinamika tersebut tentu saja melibatkan anak muda yang dianggap sedang pada proses pencarian dan pembentukan karakter dan penanaman ideologi. Target terhadap anak muda ini bisa dimaklumi karena jumlahnya yang sangat besar. Jika bisa

mempengaruhi pemikiran dan sikap anak muda, maka hal ini bisa menjadi investasi yang baik di masa depan dimana anak muda adalah calon penerus bangsa. Artinya, target jangka panjangnya adalah menjadikan anak muda saat ini sebagai pemimpin masa depan yang pikiran dan tindakannya tidak sepenuhnya taat terhadap ideologi Pancasila.

Hal ini bisa terjadi karena sumber pengetahuan anak muda pasca orde baru tidak hanya terbentuk dari ceramah di kelas yang diberikan oleh guru atau dosen. Lebih dari itu, anak muda di masa reformasi ini memiliki kemewahan lain yaitu kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet dan ekspresi yang bebas di media sosial. Hasilnya adalah terjadinya diskusi yang bebas terhadap ideologi politik kebangsaan. Perbincangan terhadap Pancasila bisa meluas tanpa batas dan tidak ada kontrol. Demikian pula dengan diskusi tentang ideologi selain Pancasila. Kampanye ideologi khilafah misalnya, sangat masif melalui jaringan media sosial dan pembentukan grup terbatas di platform komunikasi seperti *whatsapp* maupun *telegram*. Tak pelak, meningkatnya akses internet dan mudahnya menggunakan media sosial berperan penting dalam membangun perbincangan hingga gugatan terhadap ideologi Pancasila.

Kelonggaran ini bisa dipahami sebagai imbas dari ketidakjelasan arah politik dan kebijakan keagamaan periode pemerintah SBY yang memerintah selama 10 tahun pasca reformasi yakni tahun 2004-2014. Kurangnya ketegasan dalam menangani kasus-kasus kekerasan bercorak keagamaan membuat keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi menurun (Kersteen, 2018).

Disamping pengaruh jaringan internasional dan kemajuan perkembangan teknologi, cara pandang anak muda muslim terhadap Pancasila juga terbentuk dari situasi lokal dan nasional dimana pada masa awal reformasi sangat kencang tuntutan kampanye peraturan daerah (perda) syariah di berbagai daerah. Banyaknya kelompok dan gerakan di berbagai daerah yang menuntut dan memperjuangkan perda syariah menjadikan kondisi sosial dan politik di tanah air menjadi berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi pada masa Presiden Soeharto masih berkuasa (Anwar, 2018; Hara, 2010).

Situasi dan kondisi tersebut membuat pemikiran dan sikap anak muda muslim di Indonesia tidak terkecuali di Solo Raya menjadi beragam. Selain karena berbagai faktor di atas, pandangan yang tidak tunggal ini juga disebabkan oleh faktor lingkungan dan orientasi organisasi dimana anak muda tersebut bernaung dan beraktivitas. Kebanyakan informan yang berlatar belakang sekolah atau organisasi yang terhubung ke organisasi berwatak inklusif dan moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, maka pikiran dan tindakan anak mudanya relatif moderat dan sejalan dengan pandangan pokok organisasi induknya tersebut.

Berbeda dengan informan di atas, penulis mendapati gejala yang penting dicermati dari informan yang masih berstatus siswa di sekolah tingkat atas. Gejalanya

adalah adanya pandangan yang masih belum sepenuhnya bulat terhadap Pancasila sebagai ideologi politik dan dasar negara. Indikasinya adalah ketika memperbincangkan tentang Islam dan Pancasila, informan ini mengatakan bahwa Islam bukan faktor utama dan inspirasi tunggal dalam perumusan Pancasila. Karena itu, informan ini melihat tidak adanya motivasi yang kuat untuk menempatkan Pancasila sebagai ideologi politik bangsa dan sebagai dasar negara. Menurutnya, Pancasila adalah kompromi berbagai ideologi sehingga tidak hanya bersumber dari Islam semata.

Dari perspektif politik rekognisi, adanya kecenderungan untuk menolak Pancasila sebagai dasar negara bisa dinilai sebagai politik anti pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini memperkuat temuan penelitian yang dilakukan oleh Bamualiam, Bakar (2017) & Latif (2018) yang menginformasikan adanya beberapa informan yang tidak menerima Pancasila dengan alasan karena Pancasila dirumuskan oleh manusia. Kesamaan alasan yakni Pancasila merupakan ideologi buatan manusia menjadikan para informan ini meyakini tidak perlunya mematuhi dan mengakui Pancasila. Hal ini berbeda dengan ketaatan terhadap Islam dan Al-Quran.

Konstruksi pemikiran dan tindakan tersebut bisa jadi karena anak muda tersebut mendapat informasi dan pengetahuan dari tokoh agama atau ulama yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang utuh dan mencakup semua hal dalam kehidupan termasuk tata kelola kekuasaan sehingga menolak semua ideologi dan model pemerintahan yang dirumuskan manusia (Hasan dan Ajudin dalam Burdah, Kailani, & Ikhwan, 2019). Imbasnya, kelompok anak muda ini tidak mau menerima ideologi yang disusun dan dirumuskan manusia.

Secara umum, persepsi, pikiran dan tindakan anak muda muslim di Solo Raya masih dalam koridor pro terhadap Pancasila. Mayoritas informan setuju dan menerima Pancasila sebagai ideologi politik bangsa dan dasar negara. Mereka juga menganggap bahwa Islam merupakan inspirasi utama perumusan Pancasila apalagi jika menilik sejarah bahwa para perumus Pancasila banyak yang beragama Islam.

Namun demikian, kita tidak bisa mengabaikan adanya fakta dan gejala anak muda yang pikirannya mengarah pada sisi kontra terhadap Pancasila. Meskipun minoritas secara kuantitas, adanya anak muda yang terkesan tidak bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara secara utuh berpotensi meluas jika dibiarkan. Apalagi lanskap sosial dan politik Solo Raya sangat dinamis. Secara politik elektoral, Solo Raya adalah basis partai nasionalis. Tetapi secara politik keseharian, Solo Raya dipetakan sebagai basis gerakan radikalisme ekstrem. Dengan gambaran yang demikian, kita tidak boleh mengabaikan gejala kontra Pancasila sekecil apapun. Gejala ini akan menjadi benih yang tumbuh subur ketika bertemu dengan kelompok atau gerakan yang pro radikalisme ekstrem.

Pencegahan ini bisa dilakukan dengan melibatkan anak muda terutama para pemimpinnya di dalam gerak perubahan sosial, ekonomi dan politik serta menjadikan anak muda sebagai bagian dari agensi perjuangan dalam kerangka penciptaan keamanan dan kedamaian di Indonesia (Qodir, 2016).

Penutup

Di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila menjadi instrumen indoktrinasi terhadap semua lapisan masyarakat. Runtuhnya pemerintahan orde baru menjadikan publik bersikap skeptis terhadap Pancasila. Inilah awal mula lunturnya perbincangan Pancasila dalam ruang publik dan diabaikan dalam dunia pendidikan. Dalam dua dekade pasca rezim otoriter, Pancasila menjadi perbincangan pokok karena mulai adanya indikasi penurunan keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara.

Artikel ini menarasikan respons anak muda muslim di Solo terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan relasi antara Islam dengan Pancasila. Narasi ini menghasilkan adanya keragaman pandangan. Jika diringkas, pandangan mayoritas mengarah pada pro terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dan menganggap tidak adanya permasalahan pokok terkait hubungan antara Islam dan Pancasila. Sementara pandangan minoritas mengarah pada kontra terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini berpijak pada masih belum adanya keyakinan dan kebulatan menempatkan Pancasila sebagai perekat bangsa.

Adanya pandangan yang pro dan kontra ini mendukung argumen tulisan dimana keragaman pandangan ini sebagai hasil dari semakin menurunnya perbincangan dan pendalaman terhadap Pancasila pasca reformasi. Hal ini tidak hanya didukung oleh temuan artikel ini tetapi juga dari survei publik yang dilakukan berbagai lembaga yang menunjukkan adanya penurunan keyakinan terhadap Pancasila. Lanskap politik yang pada awal reformasi tidak ketat terhadap penguatan ideologi negara juga berkontribusi pada munculnya keragaman pandangan ini.

Artikel ini berkontribusi memperkaya kajian tentang anak muda muslim pasca reformasi terutama terkait sosialisasi ideologi negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang ada agenda massif tentang sosialisasi empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi hal ini tampaknya belum optimal dan perlu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat terutama kalangan anak muda.

Kajian dalam artikel ini baru sebatas menyelidiki pandangan anak muda di wilayah Solo yang dicirikan sebagai daerah yang menjadi basis gerakan radikalisme ekstrem. Ke depan, perlu ada perluasan kajian di daerah yang netral atau membandingkan daerah netral dan daerah yang menjadi basis gerakan radikalisme ekstrem.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para informan yang telah berkenan diwawancarai untuk keperluan penulisan artikel ini.

Pendanaan

Artikel ini berasal dari laporan penelitian yang dibiayai oleh BOPTN IAIN Surakarta Tahun 2019 Kluster Penelitian Peningkatan Kapasitas-Pembinaan.

Daftar Pustaka

- Acac, M. . (2015). Pancasila : A Contemporary Application of Maqashid al-Shariah? *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 59--78.
- Ahyar, M. (2015). Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam. *Jurnal Walisongo*, 57(1), 25–50.
- Al Farisi, L. . (2019). Benturan Ideologis : Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca Reformasi? *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 81–96.
- Anwar, M. Z. (2018). Mencegah Regenerasi Radikal Ekstrem. Retrieved from solopos.com/mencegah-regenerasi-radikal-ekstrem-916228
- Arif, S. (2016). Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 19–34.
- Azca, N. ., Ikhwan, H., & Arrobi, M. . (2019). Tale of Two Royal Cities : The Narratives of Islamist' Intolerance in Yogyakarta and Solo” Al-Jāmi‘ah. *Journal of Islamic Studies*, 57(1), 25–50.
- Bakar, H. A. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 107–122.
- Bayat, A., & L, H. (2010). Introduction : Being Young and Muslim in Neoliberal Times. In *Being Young and Muslim ; New Cultural Politics in the Global South and North* (Linda Herr). Oxford: Oxford University Press.
- Burdah, I., Kailani, N., & Ikhwan, M. (2019). *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian.
- Cnbcindonesia.com. (2019). Deretan Direksi BUMN yang Terciduk KPK di Bawah Pimpinan Rini. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801123255-4-89099/deretan-direksi-bumn-yang-terciduk-kpk-di-bawah-pimpinan-rini>
- CSIS. (2017). *Ada Apa Dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. . (1994). Introduction : Entering the Field of Qualitative Research. In *Handbook of Qualitative Research* (Norman K.). California: Sage Publication.
- Foundation, W. (2018). *Tren Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim*

- Indonesia. Jakarta.
- Geertz, C. (1981). Ikatan-Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan Di Negara-Negara Baru. In *Pembangunan Politik Dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hara, A. (2010). Pancasila and The Perda Syariah Debates in the post Suharto Era : Toward a New Political Consensus. In *Islam in Contention : Rethinking Islam and State in Indonesi*. Kiyoto: Kyoto, Wahid Institute, CSEAS Kyoto University dan Capas Taiwan.
- Haryanto, J. . (2015a). Perkembangan Gerakan ISIS dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS di Surakarta). *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(02), 239–253.
- Haryanto, J. T. (2015b). Relasi, Transformasi dan Adaptasi Tradisionalis Terhadap Puritanisme Di Surakarta Jawa Tengah. *Jurnal Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(3), 23–40.
- Hasan, N. (2012). *Islam Politik Di Dunia Kontemporer; Konsep, Genealogi dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press.
- Heywood, A. (2007). *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hiariej, & Stokke. (2018). *Politik Kewargaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo.
- Humaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila : Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal. *Jurnal Konstektualita*, 25(2), 291–312.
- Jakarta, C. U. (2010). “Benih-Benih Islam Radikal di Masjid : Studi Kasus Jakarat dan Solo. *Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) UIN Jakarta*.
- Kafid, N. (2016). Dari Islamisme ke “Premanisme”: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokras. *Jurnal Sosiologi*, 21(1), 57–79.
- Kersteen, C. (2018). *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Pasca Reformasi*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Latif, Y. (2018a). The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno’s Way. *Jurnal Studia Islamika*, 25(2), 207–245.
- Latif, Y. (2018b). *Wawasan Pancasila*. Bandung: Mizan Media Utama.
- M., W., & Ghozali, A. M. (2011). Relasi Agama dan Negara : Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama. *Jurnal Islam Indonesia*, 4(2).
- M.A, C. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan ideologi Islam Garis Keras. *Jurnal Islam-Indonesia*, 1(1), 11–31.
- Mu’ti, A., & Burhani, A. . (2019). The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134.
- Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: P.T Serambi Ilmu

Semesta.

Saidi, A. (2009). Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan : Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 11(1), 25–50.

Secretary-General's Report to the General Assembly A/36/215. (1981). Definition of Youth. Retrieved from <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>

Tribunnews.com. (2019). Tolak Matakuliah Pancasila, pelaku Bom Bunuh Diri di Kartasura Batal Masuk IAIN Surakarta. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/04/tolak-matakuliah-pancasila-pelaku-bom-bunuh-diri-di-kartasura-batal-masukiain-surakarta>

Umardani. (2016). Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya dan Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Darul Ulum*, 9(1), 75–106.

Wildan, M. (2008). Mapping Radical Islamism In Solo : A Study of the Proliferation of Radical Islamism in Central Java, Indonesia. *Aljamiah*, 46(1), 35–69.

Tentang Penulis

M. Zainal Anwar adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penulis memiliki area riset seputar Islam, politik, dan kebijakan publik.

Yuyun Sunesti adalah dosen Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. Penulis memiliki area riset seputar sosiologi agama dan sosiologi gender.

Islah Gusmian adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penulis memiliki area riset seputar Islam, politik, dan agama.